

## **Keberterimaan Kelompok Tani Hutan pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di KPH Yogyakarta dan KPH Wilayah IX Panyabungan**

### ***Acceptance the Forest Farmer Groups in the Forest Management Units Development on FMU Region IX Panyabungan and FMU Yogyakarta***

Secunda Selamet Santoso<sup>1</sup>, Dodik Ridho Nurrochmat<sup>2</sup>, Bramasto Nugroho<sup>2</sup> & Iman Santoso<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jakarta

<sup>2</sup>Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor

<sup>3</sup>Conservation International Indonesia, Jakarta

#### ***Abstract***

*This study aims to explain acceptance of the FFG towards FMU development based on their perception and the participation level. The research located in Special Region of Yogyakarta (SRY) and North Sumatera Province who had difference of the FMU's level organization maturity, then selected three FFG who located at FMU Yogyakarta, and four FFG at FMU Regional IX Panyabungan, North Sumatera Province. Variables were compared by ordinal number and Likert scale. Rank Spearman correlation test (Rs) used to found relation between variables. The results showed the acceptance of the FFG was quite good based on a good perception of the FMU Region IX Panyabungan's existence of 97.70%, and in FMU Yogyakarta which was only 76.38%. However, the perception of the benefits received from community empowerment was dominated by the perception that no benefit was 59.77% in FMU Wilayah IX Panyabungan, and the perception in FMU Yogyakarta that it had benefited 54.3%. The perception of community empowerment towards the level of participation in FMU Region IX Panyabungan had a weak correlation, while in FMU Yogyakarta had a strong and direct correlation to the perception of the FMU's existence. The level of participation was reflected that the maturity of the FMU organization along with the stability of FFG showed a strong enough correlation with the internal characteristics of FFG members. The Arnstein's level of the FFG's participation in FMU Region IX Panyabungan enters the level of tokens, while in FMU Yogyakarta reaches the degree of citizen power.*

**Keywords:** forest farmer group, forest management unit, collaborative, partnership, empowerment

#### **Abstrak**

Penelitian bertujuan menggambarkan keberterimaan anggota KTH terhadap program pembangunan kehutanan yang dilakukan KPH berdasarkan persepsi dan tingkat partisipasinya. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki perbedaan tingkat kematangan organisasi KPH-nya. Terpilih tiga KTH di KPH Yogyakarta dan empat KTH di KPH Wilayah IX Panyabungan, Sumatera Utara. Uji korelasi Rank Spearman (Rs) digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel. Hasil menunjukkan keberterimaan anggota KTH cukup baik berdasar pada persepsi yang baik pada eksistensi KPH Wilayah IX Panyabungan sebesar 97,70%, dan di KPH Yogyakarta yang hanya 76,38%. Namun persepsi terhadap manfaat yang diterima dari kegiatan pemberdayaan masyarakat didominasi persepsi bahwa belum ada manfaat sebesar 59,77% di KPH Wilayah IX Panyabungan, dan persepsi di KPH Yogyakarta bahwa sudah memperoleh manfaat sebesar 54,3%. Persepsi pemberdayaan masyarakat terhadap tingkat partisipasi di KPH Wilayah IX Panyabungan memiliki korelasi yang lemah, sedangkan di KPH Yogyakarta memiliki korelasi yang cukup kuat dan searah pada persepsi terhadap eksistensi KPH. Tingkat partisipasi tergambar bahwa kematangan organisasi KPH seiring dengan kematangan KTH menunjukkan korelasi cukup kuat dengan karakteristik internal anggota KTH. Tingkat partisipasi KTH di KPH Wilayah IX Panyabungan walaupun dalam persentase yang tinggi dapat diduga masuk pada tingkatan partisipasi Arnstein adalah derajat *token*, sedangkan di KPH Yogyakarta sudah sampai pada derajat *citizen power*.

**Kata kunci:** kelompok tani hutan, kesatuan pengelolaan hutan, kolaboratif, kemitraan, pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

**E-mail:** secunda.e28@gmail.com

## Pendahuluan

Masyarakat sebagai subyek pembangunan memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan kehutanan. Kelestarian hutan saat ini harus mempertimbangkan faktor manusia yang hidup dan berkembang di sekitar hutan sebagai variabel yang menentukan kelestarian hutan (Hyde, 2005). Sebagai pendekatan rasionalitas sosial suatu pembangunan dapat dilakukan dengan melihat keberterimaan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatannya. Salah satu upaya menilai keberterimaan masyarakat adalah dengan melihat persepsi dan tingkat partisipasi masyarakatnya.

Persepsi sebagai suatu proses yang memberikan kesadaran kepada individu tentang suatu obyek atau peristiwa di luar dirinya melalui panca indera. Menurut Sarwono (1999) perbedaan persepsi antara satu orang dengan orang lainnya disebabkan oleh perhatian, harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul, kebutuhan, sistem nilai dan ciri kepribadian. Tidak selamanya persepsi baik akan berkaitan dengan perilakunya yang baik terhadap suatu objek. Hubungan persepsi masyarakat yang baik terhadap kawasan hutan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perilakunya (Irawan *et al.*, 2017). Sehingga selain persepsi diperlukan ukuran lain yang dapat menjadi ukuran keberterimaan masyarakat dengan melihat tingkat partisipasinya.

Wulandari (2010) melakukan penelitian persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lanskap agroforestri dengan hasil penelitian diketahui bahwa luas lahan, pendidikan dan jumlah pelatihan adalah faktor berbeda sangat nyata; pendapatan adalah faktor yang berbeda nyata. Adapun faktor umur dan jenis pekerjaan adalah faktor yang tidak berbeda nyata. Penelitian Dolisca *et al.* (2007) menunjukkan bahwa petani paling menghargai tujuan ekonomi dan lingkungan, seperti pariwisata dan kegiatan penanaman pohon, dalam mempromosikan program kehutanan di dalam Cagar Alam.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang berarti *take part in* (ambil bagian). Menurut Mubyarto (1984) pengertian partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengurangi kepentingannya diri sendiri. Pengertian partisipasi menurut (World Bank 1996; Nurrochmat *et al.*, 2016) adalah suatu proses, dimana *stakeholders*, turut berperan memengaruhi dan ikut mengawasi, dalam pengembangan inisiatif, pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya yang terkait dengan dan berakibat pada mereka. Sedangkan batasan partisipasi bisa berbeda antar individu (Nurrochmat *et al.*, 2016). Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peran serta, keikutsertaan, atau perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (KBBI 2014).

Konsep partisipasi mulai berkembang dan diadopsi sebagai konsep penting dalam strategi pembangunan di berbagai negara sejak tahun 1980-an (Nurrochmat *et al.*, 2016). Terdapat beberapa terminologi yang digunakan dalam partisipasi yaitu (Henkel dan Stirrat, 2001; Nurrochmat, 2016): *participation*, *empowerment*, *bottom-up planning*, dan *indigineous knowledge*. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai (World Bank, 1996; Nurrochmat *et al.*, 2016), membagi dua kategori partisipasi, yaitu: (1) *popular participation*, yang difokuskan untuk kelompok masyarakat tertentu; dan (2) *stakeholder participation*, yang melibatkan seluruh *stakeholder*. Tingkatan partisipasi yang mengacu pada konsep partisipasi (Arnstein, 1969; Nurrochmat *et al.*, 2016) tidak dimaknai sebagai “baik” atau “buruk” tetapi “sesuai” atau “tidak sesuai”. Tingkatan partisipasi Arnstein menjelaskan tingkatan partisipasi dari mulai *non-participation* menuju tingkat yang lebih partisipasi dengan bentuk tingkat *degrees of citizen power*.

Penggolongan tahapan dalam partisipasi menurut Uphoff dan Cohen (Ndraha, 1990) yang membagi tahapan partisipasi

pembangunan mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Tahapan partisipasi meliputi: (1) partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pembuatan keputusan, (2) partisipasi dalam melaksanakan operasional pembangunan, (3) partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan dan (4) partisipasi dalam menilai pembangunan.

Hubungan persepsi dengan partisipasi menurut Susiatik (1998), Haryanto (2003), Zulfarina (2003), Erwina (2005), dan Kholiq (2009) bahwa persepsi masyarakat berhubungan positif dengan tingkat partisipasinya. Namun, berbeda halnya dengan penelitian Amrijono (1993) dan Purnomo *et al.*, (2017) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat.

Masyarakat terhadap eksistensi KPH dilakukan terhadap masyarakat desa yang telah melakukan kegiatan secara nyata dengan KPH. Kegiatan masyarakat dengan KPH dapat berupa program pemberdayaan masyarakat, pengamanan hutan bersama masyarakat, dan kegiatan lain yang telah direncanakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengukur tingkat keberterimaan anggota KTH terhadap program pembangunan KPH berdasarkan persepsi dan tingkat partisipasinya.

Dilihat dari penggolongan kematangan organisasi Mintzberg (1989) maka KPH Yogyakarta bisa dianggap sebagai organisasi yang sudah matang, sedangkan organisasi KPH Wilayah IX Panyabungan digolongkan sebagai organisasi yang sedang tumbuh. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan karakteristik masing-masing KPH dengan tingkat perkembangan organisasi KPH yang dapat menjadikan strategi untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa sekitar hutan.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian termasuk menggunakan metode penelitian survai dengan melakukan pengambilan sampel dari populasi secara (sengaja) *purposive* dan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpul data pokok. Populasi penelitian dipisahkan antara populasi anggota KTH di KPH Yogyakarta dan di KPH Wilayah IX Panyabungan dengan menggunakan metode peetapan jumlah responden menurut Slovin. jumlah populasi 176 orang dan KPH Wilayah IX Panyabungan pada 4 KTH populasi 110 orang. Besarnya sampel ditetapkan berdasarkan jumlah populasi (Neuman, 2000).

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 – April 2018 di lokasi Kelompok Tani Hutan sebagai mitra pengelolaan hutan KPH yang ada di KPH Yogyakarta pada 3 KTH dengan Pengambilan lokasi dan anggota kelompok tani contoh dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan melakukan identifikasi keberadaan program-program KPH yang melibatkan KTH dengan kurun waktu kerjasama dengan KPH waktu lebih dari satu tahun. Dalam pemilihan kegiatan dari masing-masing KPH dengan mempertimbangkan keragaman bentuk program yang dilaksanakan. Unit analisis penelitian ini adalah anggota KTH yang berada di desa yang menjadi mitra kerja pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan di KPH Yogyakarta pada tiga kelompok tani hutan yaitu: KTH Madusari, KTH Mandiri dan KTH Pinusari 1. Kelompok tani hutan di KPH Wilayah IX Panyabungan ada empat kelompok tani hutan yaitu: KTH Obor, KTH Sahata Jaya I, KTH Suka Maju dan KTH Rimbun Jaya.

Kuisisioner berupa pernyataan disusun dengan menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengisian kuisisioner, wawancara, dan observasi langsung. Pengukuran persepsi dan partisipasi

dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif dan analisis statistik inferensial. Statistik inferensial yang digunakan ialah analisis uji korelasi Rank Spearman (Rs) dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 1.6.

Penggunaan skala Likert terdiri dari sejumlah pertanyaan, baik pertanyaan positif maupun pernyataan negatif. Bentuk pertanyaan positif adalah bentuk pernyataan yang menjadi indikasi sikap positif, dan pernyataan negatif adalah sebaliknya. Jawaban untuk kuisisioner pertanyaan tertutup adalah menggunakan 5 pilihan jawaban, yaitu: “setuju”, “sangat setuju”, “ragu-ragu”, “tidak setuju”, dan “sangat tidak setuju”. Pada pengolahan data untuk jawaban “sangat setuju” dan “setuju” memperoleh nilai yang sama, dan juga untuk jawaban “tidak setuju” dengan “sangat tidak setuju” memiliki nilai yang sama. Terdapat juga pertanyaan yang

jawabannya hanya dua pilihan yaitu “ya” dan “tidak”. Penilaian “ragu-ragu” untuk jawaban yang kosong/tidak diisi oleh responden.

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di dua KPH yang memiliki keunikan dari sisi kinerja operasionalnya. Contoh KPH yang telah beroperasi dan menghasilkan produksi adalah di KPH Yogyakarta. Gambaran operasional KPH di luar Jawa dapat diwakili dengan memilih KPH Wilayah IX Panyabungan sebagai salah satu contoh. Secara organisasi dan kewilayahan tidak terlalu berbeda dengan saat awal pembentukannya sebagai KPHP Model Mandailing Natal saat masih dibawah Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal sebelum era Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di berlakukan.

Tabel 1. Kriteria kategori persepsi anggota kelompok tani hutan terhadap kegiatan KPH dan program pemberdayaan masyarakat desa.

No	Variabel	Kategori
Persepsi		
1.	Kegiatan KPH	- Baik - Jelek/tidak tahu
2.	Manfaat dari perberdayaan masyarakat Melalui KPH	- Ada manfaat yang diterima. - Belum ada manfaat. - Tidak ada manfaat.
Partisipasi		
1.	Partisipasi dalam perencanaan	- Terlibat - Tidak terlibat
2.	Partisipasi dalam pelaksanaan	- Terlibat - Tidak terlibat
3.	Partisipasi dalam pemanfaatan	- Terlibat - Tidak terlibat
4.	Partisipasi dalam evaluasi	- Terlibat - Tidak terlibat

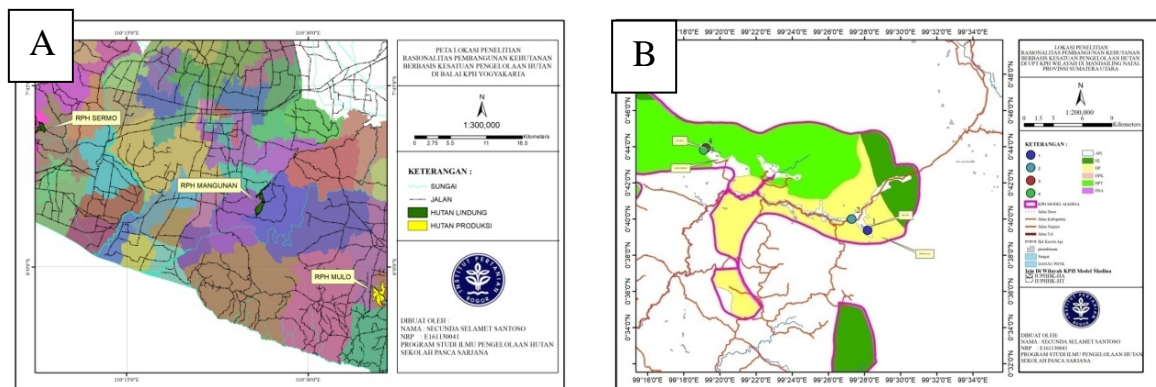
Pembentukan KPH bermula dari penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Mandailing Natal dengan luas ±159.166 Ha baru mulai aktif melakukan pengelolaan hutan adalah sejak tahun 2012

dengan dibentuk KPHP Model Mandailing Natal. Jumlah KTH yang ada dalam wilayah KPH ada 14 kelompok di 13 belas desa sekitar hutan dengan jumlah 413 orang anggota. Kelompok tani hutan bergerak

dibidang kegiatan budidaya yaitu: aren, nilam, sereh wangi, jahe merah, dan lebah madu. Sampai dengan saat penelitian belum berproduksi namun masih dalam tahap persiapan dan penanaman.

Lokasi penelitian pengambilan sampel responden di KPH Wilayah IX Panyabungan berada di Kecamatan Batang Natal. Kecamatan ini merupakan kecamatan terdekat dari posisi kantor KPH yang berada di ibu kota kabupaten. Skema perhutanan sosial yang memberikan akses kepada masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa belum dilaksanakan. Hasil identifikasi perambahan kawasan hutan terdapat luas perambahan hutan di 40 desa dalam 2 kecamatan sekitar KPH dengan luas 12.435 Ha yang ditanami karet, sawit, padi hutan dan ladang. Kapasitas organisasi KPH yang rendah tidak dapat melakukan upaya penindakan hukum. Langkah kolaborasi KPH dengan masyarakat sebagai bentuk kompromi dengan melakukan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha kehutanan produktif anggota KTH.

KPH Yogyakarta merupakan salah satu KPH percontohan dan merupakan organisasi KPH yang telah mencapai kematangan organisasi. Usaha utama KPH adalah berupa penyulingan minyak kayu putih. Pembangunan tanaman kayu putih untuk diambil daunnya sudah dilakukan sejak tahun 60-an, dimana tuntutan masyarakat sekitar hutan mendorong penanaman di sela-sela tanaman kayu jati dan rimba ditanami tanaman kayu putih yang kala itu dapat dipanen 2 tahun sekali. Saat ini tanaman kayu pinus dipanen 1 tahun sekali. Sehingga masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh manfaat dari keberadaan hutan. Kepala dinas kehutanan Yogyakarta pada tahun 1958 adalah Soedjarwo melakukan counter terhadap gerakan PKI di daerah Gunung Kidul melalui konsep *multi purpose management of forestry*. Konsep ini berusaha memakmurkan rakyat disekitar hutan yang dimiskinkan oleh Partai Komunis Indonesia (Arief *et al.*, 2007). Salah satu tanaman yang ditanam adalah kayu putih.



Gambar 2. Lokasi penelitian persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kehutanan berbasis kesatuan pengelolaan hutan; (A) KPH Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (B) KPH Wilayah IX Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu di KPH Yogyakarta memiliki keragaman bentuk perizinan perhutanan sosial, mulai dari Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan. Keberadaan dan pembentukan KTH di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup maju.

Pada tahun 2016 KPH Yogyakarta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi KTH. Dari hasil monitoring tersebut dihasilkan bahwa dari 114 KTH dengan hasil penilaian kelompok Utama sebanyak tiga KTH (2,6%), penilaian

kelompok Madya sebanyak empat puluh tujuh KTH (41,2%), dan penilaian kelompok Pemula sebanyak enam puluh empat KTH (56,1%) (Balai KPH Yogyakarta 2017).

Keragaman kegiatan KTH di KPH Yogyakarta sangat tinggi, hampir semua jenis kegiatan dan perizinan pemanfaatan

hutan baik secara swakelola maupun pemanfaatan hutan yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar hutan. Skema perhutanan sosial yang memberikan akses kepada masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Kemitraan sudah dilaksanakan dalam wilayah kerja KPH.

Tabel 2. Lokasi pengambilan sampel responden

Lokasi	Jumlah Populasi (orang)	Jumlah Responden (orang)	Wilayah Administrasi
(A) KPH Wilayah IX Panyabungan	110	87	Provinsi Sumatera Utara
1. KTH Obor di desa Aek Guo	20	14	Lokasi semua KTH berada di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal
2. KTH Sahata Jaya I di desa Ampung Julu	21	15	
3. KTH Suka Maju di desa Guo Batu	19	14	
4. KTH Rimbun Jaya di desa Lubuk Samboa	50	44	
(B) KPH Yogyakarta	176	127	Provinsi DI Yogyakarta
1. KTH Madusari	47	28	Kec. Semanu dan Kecamatan Tanjungsari
2. KTH Pinusari 1	23	15	Kab. Gunung Kidul
3. KTH Mandiri	106	84	Kec. Dlingo Kab. Bantul Kec. Kokap Kab. Kulon Progo
Jumlah Total	286	214	

Kegiatan utama KTH Pinusari I yang sebelumnya bergerak dalam pemanenan getah Pinus. Kemudian bertransformasi bekerja sama dengan Koperasi Noto Wono yang mengelola jasa lingkungan ekowisata di Resor Pengelolaan Hutan Mangunan yang melakukan kerjasama dengan KPH Yogyakarta dengan saling berbagi peran dan tanggungjawab. Komposisi bagi hasil adalah 75% untuk pihak koperasi dan 25% untuk KPH Yogyakarta. Bagian yang diperoleh Koperasi sebesar 75% dipergunakan untuk memelihara sarana dan prasarana, menggaji karyawan sekaligus pendapatan bagi anggota koperasi. Gaji karyawan yang terlibat dalam koperasi

sudah sesuai Upah Minimum Propinsi Yogyakarta sekitar Rp 1.500.000,- perbulan KPH Yogyakarta juga memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada kegiatan ekowisata serta melakukan pengawasan dan pengendalian.

Kegiatan KTH Mandiri adalah pengelolaan hutan lindung, dengan budidaya pertanian secara tumpang sari. Ketika tegakan pohon sudah besar, tidak lagi melakukan budi daya pertanian secara intensif, namun menanam rumput ternak, jamu-jamuan dan jenis pohon MPTS. Selain itu mengelola jasa lingkungan ekowisata yang cukup terkenal dan menarik banyak pengunjung.

Besarnya pendapatan yang diterima Koperasi ini belum ada mekanisme bagi hasil dengan pemerintah daerah dan KPH Yogyakarta terkendala payung hukum. Koperasi menggaji karyawan diatas upah minimum propinsi DI Yogyakarta dan memberikan pendapatan kepada anggota KTH.

Kegiatan utama KTH Madusari adalah melakukan tumpangsari tanaman palawija diantara tanaman pokok Jati. Kaitan dengan KPH, mereka terikat perjanjian untuk memelihara tanaman pokok yang menjadi tempat andilnya. Tanaman pokok yang ada adalah jati, pinus, dan kayu putih. Selama menjadi anggota KTH mereka dapat menjadi tenaga kerja penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan dengan mendapat upah dari KPH. Hasil tanaman palawija yang dihasilkan menjadi milik petani sepenuhnya. Kebutuhan lahan pertanian yang tinggi memberi motivasi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota KTH. Setiap anggota mendapat andil luas lahan garapan 0,25 Ha. Selama tegakan tanaman pokok seperti pohon jati belum menaungi maka petani dapat mengolah lahannya dengan tanaman kehidupan.

### **Karakteristik Internal Anggota Kelompok Tani Hutan**

Terdapat perbedaan yang mencolok pada karakteristik umur responden. Anggota KTH di KPH Yogyakarta didominasi oleh kelas umur tua (37,01%) dan lanjut usia (44,88%), sedangkan karakteristik umur responden di KPH Wilayah IX Panyabungan didominasi oleh kelas umur muda (74,71%). Dominasi umur tua dan lanjut usia terjadi pada KTH Mandiri, Kulon Progo, yang menunjukkan umur pembentukan KTH sejalan dengan waktu pemberian izin pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTH Mandiri berdiri dari Bupati Kulon Progo No. 452 Tahun 2007 tertanggal 12 Desember 2007.

Dominasi anggota KTH dengan usia muda sampai tua pada KTH Madusari, Gunung Kidul yang pembentukan KTH-nya baru pada tahun 2016. Berbeda halnya di KPH Wilayah IX Panyabungan yang pembentukan KTH-nya baru dilakukan pada tahun 2017 sesuai dengan dimulainya kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat oleh KPH.

Tingkat pendidikan responden di kedua KPH didominasi pendidikan sekolah dasar menunjukkan bahwa kelompok tani hutan diminati oleh tenaga berpendidikan menengah dan rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Tologbonse *et al.*, (2013) dan Hudiyani *et al.*, (2017) bahwa tingkat pendidikan yang tinggi mendorong petani untuk memperoleh peluang bekerja pada bidang lain dengan penghasilan yang lebih baik. Hal yang menarik di KTH yang memiliki unit usaha pengelolaan usaha jasa lingkungan ekowisata di KTH Pinusari 1 dan KTH Mandiri di KPH Yogyakarta terdapat kecenderungan yang menjadi pekerja adalah generasi muda di desa setempat dengan tingkat pendidikan tinggi. Pekerjaan yang dilakukan adalah jasa parkir, pemandu wisata, penjaga tiket, usaha kuliner, fotografi dan jasa wisata lainnya. Pemanfaatan utama anggota berubah dari semula tanaman palawija, setelah tertutup kanopi, menjadi usaha empon-empon, hasil hutan bukan kayu dan *multi purpose tree species*.

Tingkat pendapatan berdasarkan besaran Upah Minimum Kabupaten atau Propinsi (UMK/P) yang berlaku di Propinsi DI Yogyakarta adalah sekitar Rp 1.500.000,-/perbulan; sedangkan UMK/P Kabupaten Mandailing Natal adalah Rp 1.950.000/perbulan. Tingkat pendapatan menunjukkan bahwa dominasi anggota KTH memiliki pendapatan yang rendah di kedua KPH (kurang dari UMK/P). Pendapatan yang diterima melalui kegiatan KTH dan pendapat lain yang mungkin diterima dipersepsikan belum mencapai upah minimum yang layak.

Tabel 3. Deskripsi karakteristik internal anggota kelompok tani hutan

Karakteristik internal	Kategori	Balai KPH Yogyakarta		UPT KPH Wilayah IX Panyabungan	
		N	Persentase (%)	N	Persentase (%)
- Kelas Umur (tahun)	Muda (< 40)	23	18,11	<b>65</b>	<b>74,71</b>
	Tua (>40 – 55)	47	37,01	19	21,84
	Lanjut usia (>56)	<b>57</b>	<b>44,88</b>	3	3,45
- Tingkat Pendidikan (tahun)	Rendah (<6)	<b>65</b>	<b>51,18</b>	<b>59</b>	<b>67,82</b>
	Sedang (6-9)	22	17,32	10	11,49
	Tinggi (9-12)	37	29,13	16	18,39
	Sangat Tinggi (>12)	3	2,36	2	2,30
- Tingkat Pendapatan (Upah Minimum Kabupaten/ Propinsi [UMK/P])	Rendah (<[UMK/P])	<b>75</b>	<b>59,06</b>	<b>71</b>	<b>81,61</b>
	Sedang ([UMK/P] – 2x [UMK/P])	42	33,07	8	9,20
	Tinggi (> 2x[UMK/P])	10	7,87	8	9,20
- Jumlah Tanggungan Keluarga (jiwa)	Kecil (>2)	<b>86</b>	<b>67,72</b>	<b>37</b>	<b>42,53</b>
	Sedang (3 – 5)	38	29,92	35	40,23
	Besar (6 >)	3	2,36	15	17,24
- Pengalaman Usaha Tani (tahun)	Rendah (0-1)	10	7,87	4	4,60
	Sedang (1> – 5)	1	0,79	7	8,05
	Tinggi (6>)	<b>116</b>	<b>91,34</b>	<b>76</b>	<b>87,36</b>

Keterangan: N = jumlah responden; Sumber: Data primer (2017)

Jumlah tanggungan keluarga responden di KPH Yogyakarta didominasi kategori sedikit karena banyak responden yang memiliki anak yang sudah dewasa dan telah pisah rumah daalam dokumen kartu keluarga. Responden yang berusia tua dan lanjut usia tinggal sendiri atau hanya bersama istri atau suaminya. Berbeda halnya dengan responden di KPH Wilayah IX Panyabungan yang didominasi kategori sedang, sejalan dengan dominasi kelas umur responden yang masih relatif lebih muda, masih menanggung keluarga cukup besar karena anak masih bersekolah dan belum dewasa.

Konsekuensi dari makin sedikitnya anggota keluarga pada satu sisi mengurangi beban tanggungan biaya keluarga, pada sisi lain menyebabkan anggota KTH kekurangan tenaga kerja dalam melakukan usaha tani. Hasil wawancara di KTH Mandiri pada

umumnya sudah tidak lagi mengerjakan sendiri, namun mengupahkan ke orang lain atau melalui mekanisme bagi hasil. Kekurangan sumberdaya manusia yang terjun dalam mengolah pertanian disebabkan anak-anak muda yang telah mencapai pendidikan tinggi tidak mau lagi terjun ke usaha pertanian mereka lebih mencari bidang lain sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya sejalan dengan penelitian Tologbonse *et al.* (2013) yang menyatakan tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi. Bahkan sebaliknya ketika KTH Mandiri membuka unit usaha peternakan, koperasi simpan pinjam dan jasa lingkungan ekowisata dengan pendapatan yang besar. Generasi muda yang menjadi penerus KTH Mandiri banyak yang kembali ke desa untuk menjadi tenaga pelaksana usaha jasa lingkungan ekowisata.



Pengalaman usaha tani para responden di kedua KPH menunjukkan bahwa pengalaman anggota KTH untuk berusaha tani cukup lama dan bahkan banyak yang sejak kecil sudah mulai membantu orang tua bekerja di kebun dan ladang. Anggota KTH golongan usia muda dan memiliki pengalaman usaha tani tidak banyak terdapat di KPH Yogyakarta. Ada beberapa anggota yang berusia muda adalah

mewarisi keanggotaan orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi bekerja usaha tani.

### Persepsi dan Tingkat Partisipasi

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hubungan karakteristik internal dengan tingkat persepsi responden anggota KTH di KPH Yogyakarta dan KPH Wilayah IX Panyabungan menunjukkan korelasi yang sangat lemah.

Tabel 4. Nilai koefisien hubungan karakteristik internal dengan persepsi

Karakteristik Internal	Persepsi	
	KPH Yogyakarta	KPH Wilayah IX Panyabungan
Kelas umur	0,123	-0,160
Tingkat pendidikan	-0,002	0,139
Tingkat pendapatan	-0,018	-0,066
Jumlah tanggungan keluarga	-0,068	-0,106
Pengalaman usaha tani	0,212*	-0,098

Keterangan : \*\* = korelasi sangat nyata pada taraf  $\alpha = 1\%$ , \* = korelasi nyata pada taraf  $\alpha = 5\%$ .

Tabel 5. Nilai koefisien hubungan karakteristik internal dengan tingkat partisipasi.

Karakteristik Anggota KTH	Tingkat Partisipasi	
	KPH Yogyakarta	KPH Wilayah IX Panyabungan
Kelas umur	-0,339**	-0,080
Tingkat pendidikan	0,185*	0,139
Tingkat pendapatan	0,308**	0,131
Jumlah tanggungan keluarga	0,148	-0,187
Pengalaman usaha tani	-0,276**	-0,107

Keterangan : \*\* = korelasi sangat nyata pada taraf  $\alpha = 1\%$ , \* = korelasi nyata pada taraf  $\alpha = 5\%$ .

Hubungan karakteristik internal dengan partisipasi responden di KPH Wilayah IX Panyabungan pada Tabel 5 semuanya menunjukkan korelasi sangat lemah. Namun di KPH Yogyakarta menunjukkan bahwa karakteristik kelas umur dan pengalaman usaha tani menunjukkan korelasi cukup kuat dengan tidak searah. Sedangkan karakteristik pendapatan anggota KTH menunjukkan korelasi cukup dan searah. Kematangan organisasi KPH Yogyakarta dengan diikuti kemandirian KTH menunjukkan korelasi yang cukup kuat. Sebaliknya pada organisasi KPH Wilayah IX Panyabungan yang belum

matang tidak terdapat korelasi karakteristik anggota KTH dengan tingkat partisipasi. Gambaran tingkat partisipasi masyarakat di KPH Wilayah IX Panyabungan terhadap kegiatan KPH di daerahnya cukup tinggi. Alasan utama adalah kegiatan pendampingan dan pelibatan masyarakat dalam program pembangunan di daerah tersebut adalah menarik bagi masyarakat. Ketertarikan masyarakat adalah karena selain pendamping oleh KPH juga diberikan bantuan sarana produksi sebagai demplot serta bantuan alat penyulingan minyak Nilam. Hubungan variabel-variabel dengan

tingkat partisipasi di KPH Wilayah IX Panyabungan menunjukkan korelasi sangat nyata yang cukup dan searah pada variabel motivasi petani, peran kelompok dan persepsi. Sedangkan variabel karakteristik internal dan dukungan norma memiliki korelasi sangat lemah. Motivasi petani di KPH Wilayah IX Panyabungan korelasi cukup kuat.

Pada Tabel 6 terlihat bahwa hubungan variabel dengan tingkat partisipasi memiliki korelasi yang kuat dan searah pada variabel peran kelompok di KPH Yogyakarta. Pada KPH Wilayah IX Panyabungan memiliki korelasi yang cukup dan searah pada variabel peran kelompok. Apabila dihubungkan dengan tingkat kematangan organisasi maka tidak ada perbedaan antara KPH Yogyakarta dengan KPH Wilayah IX Panyabungan, bahwa pada variabel peran kelompoklah terdapat korelasi yang cukup kuat.

Peran kelompok menunjukkan tingkat kematangan kelompok. Pada kelompok tani hutan di Yogyakarta menunjukkan peran

kelompok sebagai wadah berbagi informasi, bantuan sarana produksi pertanian dan saran simpan pinjam. Keinginan akan pemenuhan ekonomi sesuai dengan Dolisca *et al.*, (2007) yang menyatakan adanya motivasi dan persepsi ekonomi dan lingkungan dapat mendorong untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Kehadiran kelompok tani hutan kadang menyatu dengan kegiatan kelompok kemasyarakatan seperti kelompok pedukuhan atau dusun dan pertemuan bulanan yang diorganisir oleh pengurus desa. Pada KTH di KPH Wilayah IX Panyabungan baru sebatas wadah berbagi informasi berupa rapat-rapat pertemuan yang diinisiasi pihak luar kelompok. Pihak luar kelompok adalah bisa berasal dari instansi pemerintah seperti KPH dan dinas pertanian, juga dari lembaga swadaya masyarakat yang menjadikan lokasi desa tersebut menjadi lokasi kegiatan.

Eksistensi keberadaan KPH ditandai dengan kehadiran aparat KPH dan organisasi KPH secara langsung di lapangan. KPH Yogyakarta yang telah

Tabel 6. Hubungan variabel bebas dengan tingkat partisipasi.

Variabel-variabel	Tingkat Partisipasi	
	KPH Yogyakarta	KPH Wilayah IX Panyabungan
Karakteristik Internal	-0,020	-0,023
Motivasi Petani	0,140	-0,165
Dukungan Norma	0,162	-0,163
Peran Kelompok	0,506**	0,404**
Persepsi	-0,007	-0,097

Keterangan : \*\* = korelasi sangat nyata pada taraf  $\alpha = 1\%$ , \* = korelasi nyata pada taraf  $\alpha = 5\%$ .

memasuki tahap organisasi yang matang dengan pembagian wilayah hutan menjadi Bagian Daerah Hutan (BDH), yang kemudian dibagi lagi menjadi Resor Pengelolaan Hutan (RPH). Kehadiran RPH oleh masyarakat tidak diketahui bahwa sebenarnya merupakan kepanjangan dari KPH. Anggota KTH pada saat wawancara seringkali meminta kehadiran 'petugas kehutanan' dalam hal ini aparat KPH untuk

melihat hutan yang ada secara langsung. Kehadiran KPH diwakili oleh kehadiran RPH berinteraksi dengan anggota kelompok tani hutan. Setiap bulan sekali dilakukan rapat KTH dengan mengundang Kepala RPH masing-masing.

Persepsi terhadap eksistensi kegiatan KPH di kedua KPH dipersepsikan baik, dengan dominasi tertinggi di KPH Wilayah IX

Panyabungan sebesar 90,63%, sedangkan KPH Yogyakarta yang hanya 79,80%. Organisasi KPH yang belum matang, baru dibentuk dengan perangkat yang belum lengkap. Pengelolaan hutan belum dilakukan pembentukan wilayah pengelolaan hutannya dalam unit yang lebih kecil. Unit pengelolaan terkecil dan resor pengelolaan hutan menjadikan KPH di Mandailing Natal memobilisasi sumberdaya di kantor KPH melaksanakan kegiatan di seluruh KPH.

Kegiatan pengelolaan secara langsung berinteraksi dengan anggota KTH melalui kegiatan sosialisasi keberadaan KPH, patroli partisipatif pengamanan hutan dengan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Sehingga persepsi eksistensi KPH di Mandailing Natal lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi eksistensi KPH di Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan KPH berusaha menghindari konflik langsung dengan masyarakat. Rendahnya kapasitas organisasi KPH sehingga seringkali dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di lapangan memerlukan bantuan dari masyarakat.

Persepsi terhadap pemberdayaan masyarakat oleh KPH yang dirasakan oleh anggota KTH yang diterima oleh masyarakat di Yogyakarta menunjukkan responden di KPH Yogyakarta lebih didominasi yang tidak ada atau tidak tahu manfaat yang ada. Responden ketika ditanya lebih lanjut merasa manfaat yang diterima merupakan tidak langsung dari KPH – berasal dari kegiatan secara langsung tanpa melibatkan KPH, seperti kegiatan jasa lingkungan ekowisata KTH Pinusari 1, kegiatan Hutan Kemasyarakatan Koperasi Mandiri yang bergerak pada tanaman hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan ekowisata Kalibiru. Anggota KTH Madusari sebagian besar belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan kerjasama penanaman Jati Unggul

Nusantara, karena pada saat ini baru tahap persiapan. Padahal hakikatnya semua kegiatan di lapangan merupakan kegiatan KPH dalam pengelolaan di tingkat tapak yang tidak difahami anggota KTH.

Tingkat partisipasi anggota KTH dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak menunjukkan pada umumnya dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan tidak semua anggota KTH terlibat, dan semua anggota KTH terlibat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan saja. Perencanaan dan evaluasi melibatkan anggota tertentu dan pengurus inti. Namun demikian ada pula anggota KTH yang memiliki persepsi dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi karena turut diundang hadir dalam rapat walau hanya sebagai pendengar dan bersifat pasif.

Jumlah anggota setiap KTH di KPH Wilayah IX Panyabungan tidak terlalu banyak. Kehadiran anggota dalam setiap rapat-rapat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi kegiatan menjadi hal yang biasa dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudrajat *et al.* (2016) bahwa partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat tergolong rendah, bersifat pasif, dan bercirikan pendekatan *top-down*. Partisipasi pada umumnya berbentuk pemberian bantuan tenaga dan materi, dan bukan berbentuk ide atau gagasan. Partisipasi terjadi pada semua tahapan hutan rakyat (perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan). Terjadinya dominasi elit dalam semua tahapan partisipasi petani sejalan dengan hasil penelitian Tadesse *et al.* (2017) yang melakukan penelitian partisipasi petani di barat daya Ethiopia. Elit yang memimpin kelompok umumnya mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi dan sebagai tokoh masyarakat yang dihormati seperti sebagai kepala desa, tokoh agama dan pegawai negeri.

Tabel 7. Deskripsi persepsi dan partisipasi anggota kelompok tani hutan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Variabel	Kategori	KPH Yogyakarta		KPH Wilayah IX Panyabungan	
		N	Persentase (%)	N	Persentase (%)
A. Persepsi					
- Persepsi atas kegiatan KPH	Buruk/tidak tahu	30	23,62	2	2,30
	Baik	<b>97</b>	<b>76,38</b>	<b>85</b>	<b>97,70</b>
- Manfaat Pemberdayaan masyarakat	Tidak ada/ tidak tahu	50	39,37	10	11,49
	Belum	8	6,30	<b>52</b>	<b>59,77</b>
	Sudah	<b>69</b>	<b>54,33</b>	25	28,34
B. Partisipasi					
- Partisipasi perencanaan	Terlibat	59	46,46	35	40,23
	Tidak Terlibat	<b>68</b>	<b>53,54</b>	<b>52</b>	<b>59,77</b>
- Partisipasi pelaksanaan	Terlibat	29	22,83	0	0
	Tidak Terlibat	<b>98</b>	<b>77,17</b>	<b>87</b>	<b>100,00</b>
- Partisipasi pemanfaatan	Terlibat	27	21,26	0	0
	Tidak Terlibat	<b>100</b>	<b>78,74</b>	<b>87</b>	<b>100,00</b>
- Partisipasi evaluasi	Terlibat	<b>72</b>	<b>56,69</b>	36	41,38
	Tidak Terlibat	55	43,31	<b>51</b>	<b>58,62</b>

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada kedua KPH memiliki nilai korelasi yang cukup pada persepsi terhadap eksistensi kegiatan KPH. Korelasi searah dengan tingkat sangat nyata di KPH Yogyakarta dan korelasi yang nyata di KPH Wilayah IX Panyabungan. Korelasi persepsi anggota yang kuat yang kuat menunjukkan bahwa keberadaan pengelolaan hutan dengan bentuk organisasi KPH sudah dikenal eksistensinya. Namun demikian walaupun organisasi yang masih baru, dengan sosialisasi yang gencar oleh UPT KPH Wilayah IX Panyabungan maka persepsi eksistensi keberadaan KPH memiliki korelasi yang cukup baik.

Persepsi pemberdayaan masyarakat dihubungkan dengan partisipasi di KPH Wilayah IX Panyabungan memiliki korelasi yang lemah, sedangkan di KPH Yogyakarta memiliki korelasi yang cukup kuat dan searah pada persepsi terhadap eksistensi KPH. Pada organisasi KPH yang belum matang seperti yang ditunjukkan pada KPH Wilayah IX Panyabungan menunjukkan hubungan antara persepsi dan tingkat

partisipasi korelasinya sangat lemah. Hubungan persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat pada organisasi KPH yang sudah matang dapat diduga juga seiring dengan kematangan KTH yang ada di wilayah KPH adalah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susiatik (1998), Haryanto (2003), Zulfarina (2003), Erwina (2005), dan Kholiq (2009) bahwa persepsi masyarakat berhubungan positif dengan tingkat partisipasi masyarakat. Walaupun apabila diteliti lebih jauh apakah persentase tingkat partisipasi yang tinggi sejalan dengan tingginya tingkat kualitas partisipasi Arnstein (1969), dan Nurrochmat *et al.*, (2016). Tingkat partisipasi KTH di KPH Wilayah IX Panyabungan walaupun dalam persentase yang tinggi pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi dapat diduga masuk pada tingkatan partisipasi Arnstein (1969); Nurrochmat *et al.*, (2016) adalah derajat token yaitu tingkat *placation, consultation dan informing*. Berbeda halnya dengan tingkat partisipasi yang ada di KPH Yogyakarta walaupun secara persentase lebih sedikit,

Tabel 8. Hubungan variabel persepsi dengan tingkat partisipasi

Variabel-variabel	Tingkat Partisipasi	
	KPH Yogyakarta	KPH Wilayah IX Panyabungan
Persepsi terhadap eksistensi KPH	0,364**	0,228*
Persepsi manfaat pemberdayaan masyarakat	-0,151	-0,101

Keterangan : \*\* = korelasi sangat nyata pada taraf  $\alpha = 1\%$ , \* = korelasi nyata pada taraf  $\alpha = 5\%$ .

namun tingkat partisipasi KTH sudah sampai pada derajat *Citizen Power*, dengan tingkatan *delegated power* dan *partnership* dengan KPH.

Tingginya jumlah persentase tingkat partisipasi di KPH Wilayah IX Panyabungan adalah karena jumlah anggota setiap KTH tidak terlalu banyak. Kehadiran anggota dalam setiap rapat-rapat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi kegiatan menjadi hal yang biasa dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudrajat *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat tergolong rendah, bersifat pasif, dan bercirikan pendekatan *top down*. Partisipasi pada umumnya berbentuk tenaga dan materi, bukan berbentuk ide atau gagasan. Partisipasi terjadi pada semua tahapan hutan rakyat (perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan). Terjadinya dominasi elit dalam semua tahapan partisipasi petani sejalan dengan hasil penelitian Tadesse *et al.* (2017) yang melakukan penelitian partisipasi petani di barat daya Ethiopia.

### Kesimpulan

Keberterimaan anggota KTH cukup baik didasarkan pada persepsi tentang eksistensi kegiatan KPH yang sudah baik, dengan hasil tertinggi di KPH Wilayah IX Panyabungan sebesar 97,70%, dan yang memberi persepsi baik di KPH Yogyakarta yang hanya 76,38%. Namun persepsi terhadap manfaat yang diterima dari kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh KPH didominasi persepsi belum ada

manfaat sebesar 59,77% anggota KTH di KPH Wilayah IX Panyabungan, sedangkan di KPH Yogyakarta didominasi persepsi sudah memperoleh manfaat sebesar 54,3%.

Persepsi pemberdayaan masyarakat dihubungkan dengan partisipasi di KPH Wilayah IX Panyabungan memiliki korelasi yang lemah, sedangkan di KPH Yogyakarta memiliki korelasi yang cukup kuat dan searah pada persepsi terhadap eksistensi KPH. Pada organisasi KPH yang belum matang seperti yang ditunjukkan pada KPH Wilayah IX Panyabungan menunjukkan hubungan antara persepsi dan tingkat partisipasi korelasinya sangat lemah

Pada tingkat partisipasi tergambar bahwa kematangan organisasi KPH seiring dengan kematangan KTH menunjukkan korelasi karakteristik internal anggota KTH yang cukup kuat. Organisasi KPH Yogyakarta yang matang diimbangi dengan KTH yang mantap, sebaliknya organisasi KPH Wilayah IX Panyabungan yang belum matang tidak terdapat korelasi karakteristik anggota KTH dengan tingkat partisipasi. Apabila dihubungkan dengan tingkat kematangan organisasi maka tidak ada perbedaan pada variabel peran kelompok korelasi yang cukup kuat di KPH Yogyakarta dengan KPH Wilayah IX Panyabungan. Tingkat partisipasi KTH di KPH Wilayah IX Panyabungan walaupun dalam persentase yang tinggi pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi dapat diduga masuk pada tingkatan partisipasi Arnstein (1969); Nurrochmat *et al.*, (2016) adalah derajat *token* yaitu tingkat *placation, consultation dan informing*.

Berbeda halnya dengan tingkat partisipasi yang ada di KPH Yogyakarta walaupun secara persentase lebih sedikit, namun tingkat partisipasi KTH sudah sampai pada derajat *Citizen Power*. Tingginya jumlah persentase tingkat partisipasi di KPH Wilayah IX Panyabungan adalah karena jumlah anggota (*size grup*) setiap KTH tidak terlalu banyak. Kehadiran anggota dalam setiap rapat-rapat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi kegiatan menjadi hal yang biasa dilakukan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Diklat SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan bantuan pendanaan dalam penelitian ini. BPHP Wilayah II Medan, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, KPH Wilayah IX Mandailing Natal dan KPH Yogyakarta yang telah memfasilitasi penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Amrijono, Djoko. 1993. Persepsi, Sikap, dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Memasyarakatkan Taman Lingkungan di Kompleks Perumahan Kekancan Mukti di Kotamadya Semarang [tesis]. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada.
- Arnstein SR. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*. 35(4): 216-224. doi: 10.1080/01944366908977225.
- [BKPH Yogyakarta] Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta. 2017. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan ((RPHJP KPH) Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 - 2023*. Yogyakarta (ID): Balai KPH Yogyakarta.
- Dolisca F, McDaniel JM, Teeter LD. 2007. Farmers' perceptions towards forests: A case study from Haiti. *Forest Policy and Economics*. 9: 704–712. doi: 10.1016/j.forpol.2006.07.001
- Erwina. 2005. Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Lingkungan di Daerah Pesisir: Kasus Kelurahan Marunda, Jakarta Utara. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Haryanto, Bambang. 2003. Kajian Persepsi Masyarakat Lokal dalam Upaya Pengelolaan Tambak Mangrove Terpadu di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Lampung [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Henkel H, Stirrat R. 2001. Participation as Spiritual Duty; Empowerment as Secular Subjection. Di dalam: Cooke B dan Khotari U, editor. *Participation, The New Tyranny?* London (UK): Zed Books.
- Hudiyani I, Purnaningsih N, Asngari PS, Hardjanto. 2017. Persepsi Petani terhadap Hutan Rakyat Pola Agroforestry di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah *Jurnal Penyuluhan*. 13(1): 64-78.
- Hyde WF. 2005. Limitations of Sustainable Forest Management: An Economic Perspectives. Di dalam: Kant S dan Berry RA, editor. *Institutions, Sustainability, and Naural Resources*. Dordrecht (NL): Springer.
- Irawan A, Iwanuddin, Halawane JE, Ekawati S. 2017. Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 14(1): 71-82.
- Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Jakarta (ID): Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
- [KBBI] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- Online* <http://kamus.bahasaindonesia.org/>.
- Kholiq. 2009. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Lumbung Pangan di Kabupaten Lampung Barat [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Mintzberg H. 1989. The Structuring of Organizations. Di dalam: Asch D dan Bowman C, editor. *Readings in Strategic Management*. London (UK): Palgrave, doi: [https://doi.org/10.1007/978-1-349-20317-8\\_23](https://doi.org/10.1007/978-1-349-20317-8_23)
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta (ID): P3PK UGM.
- Ndraha T. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta (ID): Rineka Cipta.
- Neuman WL. 2000. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. 4th ed. Allyn and Bacon. London(UK): Sage Publication.
- Nurrochmat DR, Darusman D, Ekayani M. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan: Teori dan Implementasinya*. Bogor (ID): PT. Penerbit IPB Press.
- Purnomo B, Anggoro S, Izzati M. 2017. Analysis of perception and community participation in forest management at KPHP model unit VII-Hulu Sarolangun, Jambi Province. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 70 012034.
- Sarwono, S.W. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta (ID): Balai Pustaka.
- Sjahrir, Korten DC, Abadi AS. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
- Sudrajat A, Hardjanto, Sundawati L. 2016. Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari: Kasus di Desa Cikeusal dan Desa Kananga Kabupaten Kuningan. *Jurnal Silvikultur Tropika*. 7(1): 8-17.
- Susiatik, Titik. 1998. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT) di Desa Mojorero, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Dati II Grobogan, Jawa Tengah [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Tadesse S, Woldetsadik M, Senbeta F. 2017. Forest users' level of participation in a participatory forest management program in southwestern Ethiopia. *Forest Science and Technology*. 13(4): 164-173. doi: 10.1080/21580103.2017.1387613
- Tologbonse EB, M JM, Auta SJ, Damisa MA. 2013. Factors Influencing Women Participation in Women in Agriculture (WIA) Programme of Kaduna State Agricultural Development Project, Nigeria. *International Journal of Agricultural Economics and Extension*. 1 (7): 047-054.
- Utami SK, Wartono A. 2015. *Laporan Penyusunan Standar Rancangan Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kesatuan Pengelolaan Hutan Berdasarkan Tipologi*. Jakarta (ID): Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- World Bank. 1996. Reflections from the Participation Sourcebook\*. *Environment Departemen Dissemination Notes*. 40.
- Wulandari C. 2010. Studi Persepsi Masyarakat tentang Pengelolaan Lanskap Agroforestri di Sekitar Sub DAS Was Besai, Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 15(3): 137-140.
- Zulfarina. 2003. Persepsi dan Partisipasi Petani Terhadap Usaha Pertanian Konservasi (Studi Kasus Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Lindung Register 45B, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.